

USUL PENELITIAN



**GAMBARAN PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH)
KOTA SEMARANG TAHUN 2019
(STUDI EVALUASI KEBIJAKAN)**

**PENGUSUL :
DRS. SUHARTO, M.Si
NIDN: 0618116502**

**UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Gambaran Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Kota Semarang Tahun 2019 (Studi Evaluasi Kebijakan)

Bidang Penelitian : Ilmu Politik

Peneliti

a. Nama Lengkap : Drs. Suharto, M.Si

b. NPP : 04.15.2.0351

c. NIDN : 0618116502

d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

e. Jabatan Struktural : -

f. Fakultas /Jurusan : ISIP / Ilmu Politik

g. Pusat Penelitian : LP2M UNWAHAS

h. Alamat Institusi : Universitas Wahid Hasyim Semarang, Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan Semarang -50236


i. Telp/Faks/Email : 024-8505680

Lama Penelitian : 6 (Enam) bulan

Biaya yang diajukan : Rp. 2.000.000

Semarang, 30 April 2020

Peneliti,


Drs. Suharto, M.Si
NPP. 04.15.2.0351

Mengetahui :
Dekan


H. Agus Riyanto, S.IP., M.Si.
NPP. 04.01.1.0036

Mengetahui
Ketua LP2M Unwahas


Dr. Ifada Retno Ekaningrum, S.Ag, M.Ag
NPP. 08.05.1.0124

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Ringkasan.....	iv
Bab I. Pendahuluan.....	5
Bab II. Kajian Pustaka.....	8
Bab III. Metode Penelitian.....	15
Bab IV. Biaya dan Jadwal Penelitian.....	17
Daftar Pustaka.....	19
Lampiran.....	20

RINGKASAN

Laju urbanisasi cukup tinggi dan secara signifikan telah menyebabkan tumbuhnya kawasan permukiman miskin dan kumuh baru di berbagai sudut di perkotaan. Cepatnya laju urbanisasi yang tidak dibarengi dengan ketersediaan ruang, prasarana dan sarana serta utilitas yang cukup menyebabkan suatu kawasan permukiman *over capacity* dan menjadi kumuh. Akibat tingginya laju urbanisasi ini dapat dikatakan bahwa secara umum kota-kota terutama kota besar di Indonesia memiliki permasalahan yang kompleks menyangkut permukiman kumuh.

Penanganan perumahan dan permukiman kumuh dilaksanakan dalam berbagai bentuk pelayanan dan fasilitasi sebagai berikut : (1) pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau melalui kegiatan kredit pemilikan rumah/KPR bersubsidi dan pengembangan perumahan swadaya; (2) peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui bantuan prasarana dan sarana dasar permukiman, penyediaan sarana air bersih pada permukiman rawan air, penataan dan rehabilitasi permukiman kumuh, pemberdayaan masyarakat dalam rangka perkuatan kapasitas ekonomi dan perbaikan kehidupan sosial; (3) melembagakan sistem penyelenggaraan pengembangan perumahan dan permukiman dengan pelibatan masyarakat sebagai pelaku utama.

Mengingat kemampuan pemerintah secara rutin melalui APBN dan APBD yang sangat terbatas dalam penanganan perumahan dan permukiman kumuh, maka pemerintah mengambil keputusan untuk melaksanakan penanganan perumahan dan permukiman kumuh melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Diharapkan melalui peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat secara sinergis dibidang perumahan dan permukiman dalam KOTAKU, maka permasalahan penanganan perumahan dan permukiman kumuh akan lebih cepat tertangani. Kegiatan KOTAKU menggunakan pendekatan Tridaya.

Pelaksanaan pendekatan Tridaya dalam KOTAKU meliputi : (1) pemberdayaan pemerintah daerah dan masyarakat melalui pengembangan kapasitas dalam bentuk pelatihan dan pendampingan; (2) pendayagunaan fasilitas lingkungan dengan peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui pengadaan dan perbaikan prasarana dan sarana dasar primer serta perbaikan rumah tidak layak; dan (3) pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan melalui *chanelling* dengan program lain di bidang Pekerjaan Umum dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di daerah. Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dari program tersebut, maka peneliti perlu mengevaluasi kebijakan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Kota Semarang tahun 2019.

Kata Kunci : Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), Evaluasi Kebijakan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Cepatnya laju urbanisasi yang tidak dibarengi dengan ketersediaan ruang, prasarana dan sarana serta utilitas yang cukup menyebabkan suatu kawasan permukiman *over capacity* dan menjadi kumuh. Pada umumnya kondisi permukiman kumuh menghadapi berbagai permasalahan, antara lain : (1) luas bangunan yang sangat sempit dengan kondisi yang tidak memenuhi standar kesehatan dan kehidupan sosial, (2) kondisi bangunan rumah yang saling berhimpitan sehingga rentan terhadap bahaya kebakaran, (3) kurangnya air bersih, (4) jaringan listrik yang ruwet dan tidak mencukupi, (5) drainase yang sangat buruk, (6) jalan lingkungan yang sempit dan buruk, (7) ketersediaan sarana MCK yang sangat terbatas. Kondisi dan permasalahan tersebut telah berdampak pada timbulnya berbagai jenis penyakit, menurunnya produktivitas warga penghuni, timbulnya kerawanan dan penyakit sosial.

Akibat tingginya laju urbanisasi ini dapat dikatakan bahwa secara umum kota-kota terutama kota besar di Indonesia memiliki permasalahan yang kompleks menyangkut permukiman kumuh serta menanggung beban yang berat terutama dalam memenuhi kebutuhan perumahan warganya yang sebagian besar adalah kelompok MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Kemampuan pemerintah untuk menangani perumahan dan permukiman kumuh melalui APBN sangatlah terbatas. Secara keseluruhan area permukiman kumuh yang mampu ditangani oleh pemerintah melalui APBN dan APBD sampai tahun 2004 hanya seluas 2.875 ha, dibandingkan dengan luas keseluruhan area permukiman kumuh seluas 47.393 maka masih terdapat 44.250 ha area permukiman kumuh yang belum tertangani. Sehingga untuk mewujudkan *Cities without slums* pada tahun 2015 Pemerintah Indonesia harus mampu menangani area permukiman kumuh seluas 4.7393 ha/tahun dan di samping itu harus dilaksanakan upaya pencegahan terhadap semakin berkembang dan meluasnya area permukiman kumuh.

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa penyelenggaraan atas perumahan dan kawasan permukiman termasuk pencegahan kumuh dan peningkatan kualitas permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang. Mengingat kemampuan pemerintah secara rutin melalui APBN dan APBD yang sangat terbatas dalam penanganan perumahan dan permukiman kumuh, maka pemerintah mengambil keputusan untuk melaksanakan penanganan

perumahan dan permukiman kumuh melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Diharapkan melalui peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat secara sinergis dibidang perumahan dan permukiman dalam KOTAKU, maka permasalahan penanganan perumahan dan permukiman kumuh akan lebih cepat tertangani. Kegiatan KOTAKU menggunakan pendekatan Tridaya. Masyarakat terorganisir dalam kelembagaan lokal bermitra dengan pemerintah daerah dan dunia usaha untuk bekerjasama dalam menyediakan sarana, pembiayaan, dan keahlian teknis. Dalam hal ini masyarakat secara kolektif tetap dapat memutuskan sendiri segala sesuatu yang membawa akibat langsung maupun tidak langsung bagi mereka.

Pelaksanaan pendekatan Tridaya dalam KOTAKU meliputi : (1) pemberdayaan pemerintah daerah dan masyarakat melalui pengembangan kapasitas dalam bentuk pelatihan dan pendampingan; (2) pendayagunaan fasilitas lingkungan dengan peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui pengadaan dan perbaikan prasarana dan sarana dasar primer serta perbaikan rumah tidak layak; dan (3) pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan melalui *chanelling* dengan program lain di bidang Pekerjaan Umum dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di daerah. Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dari program tersebut, maka peneliti perlu mengevaluasi kebijakan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Kota Semarang tahun 2019.

B. PERMASALAHAN

Adapun permasalahan yang diteliti adalah : Bagaimana gambaran pogram KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Kota Semarang Tahun 2019 (Studi Evaluasi Kebijakan) ?

C. TUJUAN

Penelitian ini bertujuan : Untuk mengetahui gambaran pogram KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Kota Semarang Tahun 2019 (Studi Evaluasi Kebijakan).

D. URGENSI (KEUTAMAAN) PENELITIAN

Penelitian tentang evaluasi kebijakan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) ini merupakan tindak lanjut penelitian tentang program pemerintah (Pusat / Daerah) yang terkait program dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Program KOTAKU ini merupakan tindak lanjut dari program P2KP yang merupakan salah program untuk menanggulangi kemiskinan akibat dampak krisis ekonomi pada tahun 1999. Dalam perkembangannya program ini berubah nama menjadi PNPM P2KP yang lebih focus pada pogram pemberdayaan masyarakat. Dan seblm berubah nama menjadi program KOTAKU, program yang focus pada

kemiskinan perkotaan ini bernama program PNPM Mandiri Perkotaan. Maka ntk mengetahui gambaran yang jelas dari program KOTAKU dengan program sebelumnya perlu kita mengevaluasi kebijakan program tersebut.

Studi implementasi sudah peneliti lakukan terkait dengan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam UU Desa ini juga diatur terkait pogram pemberdayaan masyarakat desa secara jelas. Desa memiliki peranan penting dalam rangka ikut ambil bagian mensukseskan UU Desa yang menjadi harapan masyarakat desa dalam pembangunan desanya. Maka program KOTAKU sekarang menjadi focus penelitian ini. Peran penting dari kepedulian smua fihak yaitu masyarakat, pemerintah, swasta dan termasuk pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi) untuk menyumbangkan pemikiran, teknologinya ataupun tenaganya dalam menyiapkan insan yang siap mendampingi masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat sesuai amanah dalam UU Desa. Lewat Tri Dharmanya Perguruan Tinggi jelas memiliki kapabilitas dan kapasitas dalam mendukung percepatan pembangunan desa yang kita harapkan.

Maka untuk melengkapi bidang kajian Ilmu politik khususnya kebijakan publik, dan implementasi kebijakan publik, penelitian evaluasi kebijakan public ini penting untuk memperkaya khasanah ilmu politik khususnya ilmu kebijakan publik dalam proses belajar mengajar dengan mahasiswa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Anderson (1975) mengartikan kebijakan publik sebagai “kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan tersebut adalah

1. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan –tindakan yang berorientasi pada tujuan
2. Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah
3. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah , jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan
4. Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu. Atau bersifat negatif dalam arti keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu
5. Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

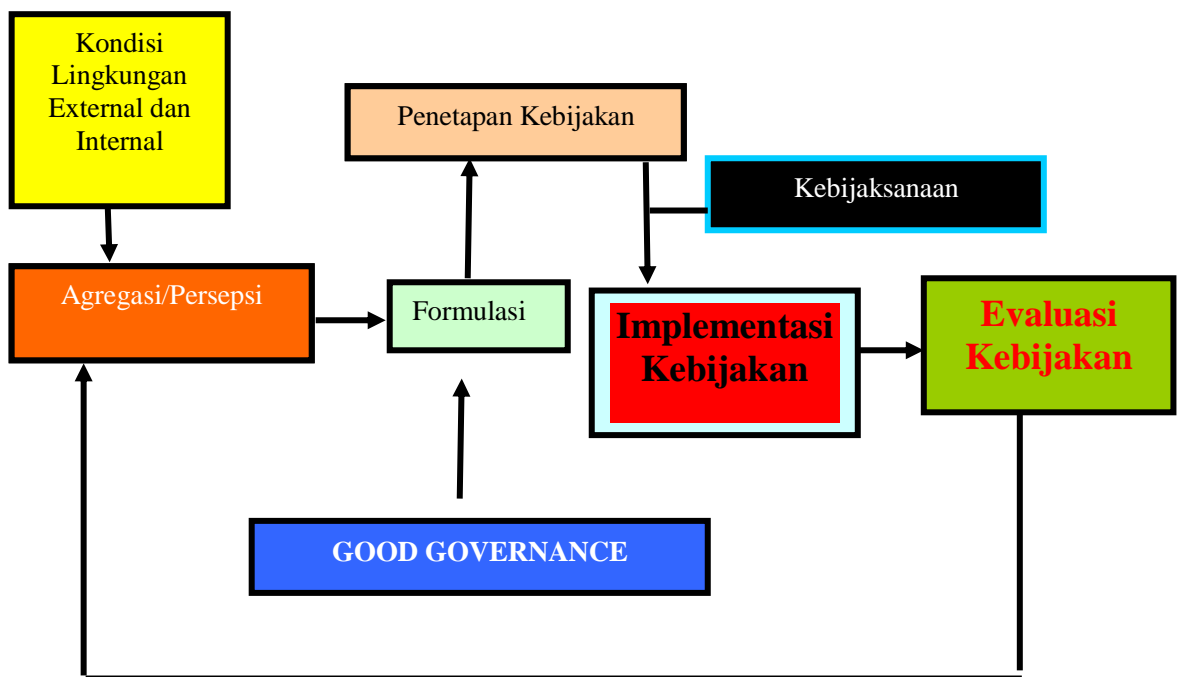
Sedangkan menurut Woll (1966) mengartikan kebijakan publik adalah “ sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah dimasyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Konsep kebijakan publik yang diberikan oleh Anderson (1979 : 46), yaitu “Public Policies are those policies developed by governmental bodies and officials”. (“Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah”).

Jadi kebijakan publik timbul melalui serangkaian proses. Artinya, kebijakan publik tidak timbul secara mendadak, melainkan melalui suatu proses tertentu yang berkaitan dengan tujuan-tujuan kebijakan. Proses yang dilalui oleh kebijakan publik merupakan suatu rangkaian yang saling berkaitan, yang setiap tahap dalam rangkaian prosesnya akan mempengaruhi tahap-tahap lainnya. Proses kebijakan publik melewati empat rangkaian tahap tindakan pemerintah.

1. Pertama, tahap persepsi/definisi agregasi, organisasi, representasi, dan penyusunan agenda, yang merupakan tindakan membawa permasalahan pada pemerintah.
2. Kedua, tahap formulasi, legitimasi, dan penganggaran, yang pada dasarnya merupakan suatu tindakan langsung pemerintah untuk mengembangkan dan mendanakan sebuah program.

3. Ketiga, tahap implementasi atau pelaksanaan, adalah sebagai tindakan pemerintah untuk kembali pada permasalahan.
4. Keempat, tahap evaluasi dan penyesuaian/ terminasi, yang pada dasarnya adalah kembalinya program kepada pemerintah untuk dilakukan peninjauan kembali atau perubahan-perubahan bilamana diperlukan.

Bagan : Tahapan Kebijakan Publik dalam Good Governance



Makna dan hakekat kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang untuk kepentingan masyarakat (public interest). Kepentingan masyarakat ini merupakan keseluruhan yang utuh dari perpaduan dan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginan-keinginan dan tuntutan-tuntutan (demands) dari rakyat. Edward dan Sharansky dalam Wahab (1997 : mengutarakan bahwa: “kebijakan public itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan, perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

Sedangkan dalam kehidupan masyarakat bernegara saat ini, baik individu, berkelompok maupun masyarakat sangat dipengaruhi oleh negara. Pengaruh ini dapat dicermati atau dirasakan mulai seseorang dilahirkan sampai mati dalam berbagai bentuk pengaturan dan kontrol Pemerintah yang bertindak atas nama negara. Fenomena ini merupakan perwujudan diterimanya

welfare state. Oleh sebab itu intervensi negara akan memberikan bentuk beragam dari pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah.

United Nations, dalam Wahab (1997) mendefinisikan: “kebijakan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman itu boleh jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, public atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.

Sedangkan Anderson memberikan pengertian kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu”. Menurut pakar analisis Kebijaksanaan berkebangsaan Inggris Brian W.Hongwood dan Luwis A. Gunn (1989) telah mengelompokkan istilah kebijaksanaan dalam beberapa macam yaitu :

1. Kebijaksanaan sebagai suatu merk bagi suatu bidang kegiatan tertentu (Policy as a label for a field of activity)
2. Kebijaksanaan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang dikehendaki (Policy as specific proposals)
3. Kebijaksanaan sebagai keputusan-keputusan pemerintah (Policy as decision of government)
4. Kebijaksanaan sebagai bentuk pengesahan formal (Policy as formal authorization)
5. Kebijaksanaan sebagai program (Policy as programme)
6. Kebijaksanaan sebagai keluaran (Policy as output)
7. Kebijaksanaan sebagai hasil akhir (Policy as outcome)
8. Kebijaksanaan sebagai teori atau model (Policy as theory or model)
9. Kebijaksanaan sebagai proses (Policy as proses)

Dalam proses kebijakan publik ini meliputi tahap-tahap :

a. Perumusan kebijakan publik.

Tahap ini mulai dari perumusan masalah sampai dengan dipilihnya alternatif untuk direkomendasikan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

b. Implementasi kebijakan publik.

Setelah kebijakan publik disahkan oleh pejabat yang berwenang, maka kemudian kebijakan publik tersebut diimplementasikan (dilaksanakan). Mengenai implementasi kebijakan publik, Mustopadidjaja AR (Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja AR. 1988)

c. Monitoring kebijakan publik.

Monitoring kebijakan publik adalah proses kegiatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan yaitu, untuk memperoleh informasi tentang seberapa jauh tujuan kebijakan itu tercapai. (Hogwood and Gunn, 1989).

d. Evaluasi kebijakan publik.

Evaluasi kebijakan publik ini bertujuan untuk menilai apakah perbedaan sebelum dan setelah kebijakan itu diimplementasikan, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah diberlakukannya suatu kebijakan.

Tahapan Kebijakan Publik dapat jga meliputi sebagai berikut :

a. Identifikasi masalah kebijakan

Identifikasi masalah Kebijakan melalui tuntutan tindakan pemerintah

b. Agenda seting

Memfokuskan pada perhatian media massa atau pejabat publik (pemerintah) pada masalah – masalah publik tertentu untuk memutuskan apa yang diputuskan.

Efek media :

1. identifikasi isu dan agenda setting untuk pengambil kebijakan
2. mempengaruhi sikap dan nilai ke arah isu kebijakan
3. mengubah perilaku voter dan pengambil keputusan

c. Formulasi Kebijakan

Merumuskan tujuan kebijakan untuk menyelesaikan masalah, melalui inisiasi dan perkembangannya dengan bagian perencanaan kebijakan, kepentingan kelompok, birkorasi pemerintah, Presiden dan Dewan. Rincian proposal kebijakan biasanya diformulasikan oleh staff yang dipandu oleh atasannya.

d. Legitimasi Kebijakan

Menyeleksi proposal, membangun dukungan politik, mensahkannya menjadi UU. (ada Tanda tangan pejabat yang mengesahkan dan stempel dari institusi yang berwenang. Melalui birokrasi yang teratur, pemberitaan publik dan kegiatan badan legislatif.

e. Impementasi Kebijakan

Mengorganisir birokrasi, menyediakan belanja atau pelayanan publik, memungut pajak dan kegiatan – kegiatan lain dari badan legislatif

f. Evaluasi Kebijakan , dalam evaluasi kebijakan program meliputi :

1. Mempelajari program
2. Melaporkan output dari program pemerintah

3. Evaluasi dampak kebijakan
4. Mengusulkan perubahan kebijakan
5. Dilakukan oleh pemerintah sendiri, konsultan luar, pers, dan publik

Dengan melihat teori atau konsep kebijakan publik yang telah diuraikan tersebut maka program KOTAKU tentang Kota Tanpa Kumuh merupakan out put kebijakan publik. Dan sekarang ini harus sudah dimulai tahapan selanjutnya yaitu evaluasi kebijakan pogram tersebut sdah tercapai. Sesuai dengan target RPJMN 2015-2020 untuk pencapaian target 0% kawasan kumuh maka dilaksanakan Program KOTAKU dimana BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) menjadi mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penanganan Kawasan Permukiman dan Kawasan Kumuh.

Permukiman kumuh yaitu pemukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Adapun indikator pemukiman kumuh yaitu :

- a. Kondisi Bangunan (Keteraturan Bangunan & Kepadatan Bangunan)
- b. Jalan Lingkungan;
- c. Drainase Lingkungan;
- d. Penyediaan Air Bersih/Minum;
- e. Pengelolaan Persampahan;
- f. Pengelolaan Limbah;
- g. Pengamanan Kebakaran; dan
- h. Ruang Terbuka Publi

Tujuan Program adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

1. Menurunnya luas permukiman kumuh;
2. Terbentuknya Pokja PKP di tingkat Kab/Kota; dalam penanganan permukiman yang berfungsi dengan baik;
3. Tersusunnya rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kab/kota dan tingkat masyarakat yang terintegrasi dalam RPJMD;
4. Meningkatkan penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastuktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh;

5. Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.

Prinsip dasar KOTAKU :

1. Pemda sebagai nahkoda;
2. Perencanaan komprehensif dan berorientasi outcome (pencapaian tujuan program);
3. Singkronisasi perencanaan dan penganggaran;
4. Partisipatif;
5. Kreatif dan Inovatif;
6. Pengelolaan lingkungan dan sosial yang menjamin keberlanjutan program investasi KOTAKU harus memuat prinsip pembangunan berkelanjutan;
7. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
8. Investasi penanganan permukiman kumuh disamping harus mendukung perkembangan kota juga harus mampu meningkatkan kapasitas dan daya dukung lingkungan;
9. Revitalisasi peran BKM, penajaman peran BKM dari orientasi penanggulangan kemiskinan kepada orientasi pencegahan dan peningkatan permukiman kumuh.

Program KOTAKU terdiri dari komponen-komponen berikut dalam rangka pencapaian tujuan program :

1. Pengembangan kelembagaan, strategy dan kebijakan;
2. Pengembangan kapasitas untuk pemerintah daerah dan masyarakat termasuk dukungan untuk perencanaan penanganan permukiman kumuh yang terintegrasi;
3. Pendanaan investasi untuk infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang terdiri dari : a. Infrastruktur skala kawasan dan skala kab/kota terpilih; b. Pembangunan kawasan permukiman baru untuk MBR; c. Infrastruktur skala lingkungan, termasuk dukungan pengembangan penghidupan berkelanjutan.
4. Dukungan pelaksanaan dan bantuan teknis;
5. Dukungan program/kegiatan lainnya, termasuk dukungan untuk kondisi darurat bencana.

Bahwa persoalan kumuh, diyakini bukan hanya berbicara persoalan fisik semata-mata. Kekumuhan dalam paradigma pembangunan manusia, adalah akibat dari persoalan pembangunan itu sendiri. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Dari sisi negara, Kawasan kumuh bisa terjadi akibat dari kebijakan yang tidak berpihak pada kaum marjinal, tidak memberikan asas keadilan dalam menyediakan akses sarana, prasarana serta utilitas

umum sebagai sandaran bagi permukiman masyarakat yang sehat dan layak huni. Dari sisi masyarakat, berbondong-bondongnya masyarakat ke kota misalnya, tanpa didukung dengan keahlian yang memadai, menyebabkan pilihan terhadap tempat tinggal menjadi sempit, belum lagi soal perilaku masyarakat yang kurang sehat, juga bisa mengakibatkan kawasan kumuh timbul.

Program KOTAKU adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 Kab/Kota di 34 Provinsi yang menjadi “Platform kolaborasi” atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Maka ada pertanyaan bagaimana Permasalahan Kumuh seluas 35.291 Ha seluruh Indonesia dapat diselesaikan pada Tahun 2019.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini yang dipakai adalah metode dokumentasi. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku / literatur, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, dan sebagainya. Dalam penelitian literatur, maka teknik pengumpulan data menggunakan teknik *library reseach* (penelitian pustaka), yaitu dengan mengambil data dari buku-buku, artikel, dan website/internet.

Pengambilan data dalam penelitian ini melalui studi pustaka, sehingga data yang diperoleh adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Sumber data yang digunakan adalah buku-buku mengenai kebijakan publik / evaluasi kebijakan publik, dan analisis kebijakan publik. Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan peraturan pelaksanaannya dan buku-buku ilmu politik/ pemerintahan yang terkait serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan serta yang mendukung penelitian ini. Sumber-sumber tersebut didapatkan melalui studi literatur dan dokumen laporan termasuk akses data melalui website / internet.

B. Cara Kerja / Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah desain deskriptif. Tipe desain penelitian deskriptif ditujukan untuk memperoleh gambaran perihal satu kenyataan atau menguji jalinan pada kenyataan yang sudah ada atau sudah berlangsung pada subjek. Didalam desain ini, peneliti tidak lakukan manipulasi perlakuan atau penempatan subjek.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif-kualitatif, yaitu berusaha menguraikan, menjelaskan penyebab suatu masalah berdasarkan data dan fakta yang ada. Di mana yang dikumpulkan berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah. Penelitian kualitatif adalah rangkaian kegiatan atau proses penyaringan data atau informasi yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah dalam kondisi, aspek atau bidang tertentu dalam kehidupan objeknya (Hadari Nawawi, 1994: 176).

C. Analisa data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif adalah suatu proses yang meliputi :

- a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri,
- b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesis, membuat ikhtisar dan membuat indeksnya,
- c. Berpikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola, hubungan-hubungan dan temuan-temuan umum. (Lexy J.Moleong, 2008: 34).

Dalam penelitian ini analisis datanya diperoleh melalui interpretasi dokumentasi yang terkumpul, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu bersifat faktual secara sistematis dan akurat. Berdasarkan data-data berupa buku-buku, artikel, dokumen laporan dan akses internet. Akses website/ internet dilakukan dengan selektif melalui alamat situs yang kredibilitasnya dapat dipercaya. Data yang telah didapatkan, kemudian akan dipilih sesuai dengan tema penelitian dan mendukung dalam analisis masalah penelitian,

BAB IV
BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

1. JUSTIFIKASI ANGGARAN PENELITIAN

1.1. Bahan Habis Pakai dan Peralatan

NO	NAMA BAHAN	KEGUNAAN	JML	HARGA SATUAN (RP)	HARGA (RP)
1	Konsumsi Rapat	Rapat	3	50.000	150.000
2	ATK	Surat menyurat, Penyusunan Laporan, Penggandaan laporan	3	100.000	300.000
3	Seminar Hasil Penelitian	FC materi dan snack	1		750.000
	SUB TOTAL				1.200.000

1.2. Anggaran Untuk Perjalanan

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	Perjalanan ke Perpustakaan Fisip UGM Yogyakarta	300.000
2	Perjalanan Dalam Kota (Perpustakaan di Wil. Semarang)	20.000
	SUB TOTAL	320.000

1.3. Pengeluaran Lain-Lain

NO	JENIS PENGELUARAN	ANGGARAN/HARGA(RP)
1	Honor Peneliti 12 bulanx Rp 40.000	480.000
	SUB TOTAL	480.000
	TOTAL JUMLAH	2.000.000

2. JADWAL PENELITIAN :

NO	JENIS KEGIATAN	2020						
		6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Proposal							
2	Pelaksanaan Penelitian							
	a. Perizinan	v	v					
	b.Mengumpulkan data dokumen		v	v	v	v		
	c.Analisa Data dan diskusi 1			v	v	v		
	d.Melengkapi data yang kurang			v	v	v		
	e. Analisa Data dan diskusi 2			v	v	v		
3	Penyusunan Laporan							
	a.Seminar Hasil Penelitian						v	
	b. Publikasi						v	
	c. laporan							v

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek edisi revisi V*. Jakarta , November 2002.
- Drs. Ali Mufiz, *Pengantar Administrasi Negara*, Karunika Jakarta , Uiversitas Terbuka 1985
- Drs. H.Dadang Solihin, MA, *Makalah Lokakarya Model Indeks Pemerintahan Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia*, Bappeda Jawa Barat Bandung, 17 April 2007.
- Drs. Hessel Nogi S.Tangkilisan, M.Si, *Kebijakan Publik yang Membumi*, Lukman Offset YPAPI, Yogyakarta, 2003.
- Arie Sulandro, *Bahan Paparan Pemetaan Good Governance, Peningkatan Pelayanan Pulik dan Penanggulangan KKN di Propinsi Kepulauan* , BPKP Pusat Jakarta-www.kepriprov.go.id, 14 November 2006.
- Drs. Solichin Abdul Wahab, MA, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara,Jakarta, 1991
- Moeloeng, Lexi J.(2008), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosdakarya
- Nawawi, ,Hadari (1994), *Metode Penelitian Ilmiah*, Jakarta:Rineka Cipta
- Wayne Parson, *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*, Kencana Prenada Media Group,Jakarta, 2006
- Suharto Edi, *Makalah Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam Pusaran Desentralisasi dan Good Governance* , Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin, 21 Maret 2006.
- Sondang P.Siagian, Prof,Dr, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung ,Jakarta, 1995
- Guy Beneviste, *Birokrasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 1994
- Koenjaraningrat, *Metode-metode Penelitia Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1980.
- The Liang Gie, *Keadilan sebagai Landasan bagi Administrasi Pemerintahan dalam Negara Republik Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Pariara Westra,Drs,SH, *Ensiklopedia Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1981.
- Fandy Tjiptono, *Manajemen jasa*, Andi Offset, Yogyakarta, 1996.
- Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Undang-Undang RI Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa
- PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014
- Dokumen RPLP dan RP2KP 2019
- SK Kumuh Kota Semarang 2019
- Acceselaration Strategy Kota Semarang 2019
- RPJMD Kota Semarang
- SK No 050/801/ 2014, Walikota Semarang Tahun 2014

LAMPIRAN :**Lampiran 1 JUSTIFIKASI ANGGARAN**

1. Bahan Habis Pakai dan Peralatan

MATERIAL	JUSTIFIKASI PEMAKAIAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN (RP)	TOTAL(RP)
1. Konsumsi Rapat	Snack dan makan siang	2 orang x 3 kali	25.000	150.000
2. ATK	A. Kertas	2 rim	40.000	80.000
	B. Alat tulis	1 paket	30.000	30.000
	C. Tinta Print	2 paket	25.000	50.000
	D. Penjepit kertas	2 unit	20.000	40.000
	E. Dokumen Keeper	4 unit	25.000	100.000
3. Seminar hasil penelitian	1. Snack	50 kotak	7.000	350.000
	2. Fotocopy materi	2000 lembar	200	400.000
JUMLAH				1.200.000

2. Anggaran Untuk Perjalanan

MATERIAL	JUSTIFIKASI PEMAKAIAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN(RP)	TOTAL(RP)
1. Perjalanan ke perpus Fisip UGM	A. Transport PP (Semarang -Yogyakarta)	2 kali (pp)	80.000	160.000
	B. Transport dalam kota(taksi)	2 kali	35.000	70.000
	C. Makan	3 kali	20.000	60.000
2. Perjalanan dalam kota Semarang	Transport (bensin)	4 kali	20.000	80.000

(Perpustakaan di wilayah kota Semarang)				
JUMLAH				380.000

3. Pengeluaran lain-lain

HONOR	BULAN	HONOR/BULAN	TOTAL
Ketua	12	20.000	490.000
Anggota	12	15.000	180.000
JUMLAH			670.000

REKAPITULASI BIAYA

NO	URAIAN	TOTAL (RP)
1	Bahan habis pakai	950.000
2	Anggaran untuk Perjalanan	380.000
3	Pengeluaran lain-lain(Honor)	670.000
JUMLAH		2.000.000

Lampiran 2

Biodata Peneliti

A. Identitas Diri Peneliti

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Drs. Suharto, M.Si.
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4	NPP	04.15.2.0351
5	NIDN	0618116502
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Madiun, 18 November 1965
7	E-mail	hartoss@gmail.com
8	Nomor Telepon/ HP	08156530992 / 081326254507
9	Alamat Kantor	Fisip, Unwahas, Jl. Menoreh Tengah X/ 22 Sampangan Semarang
10	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S1= 160 orang ;
11	Mata Kuliah yang Diampu	a. Analisis Kebijakan Publik
		b. Sistem Politik Indonesia
		c. Negara dan Masyarakat Sipil

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang	Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta
Bidang Ilmu	Adm. Negara, Ilmu Sosial & Ilmu Politik	Ilmu Politik
Tahun Masuk- Lulus	1984 - 1988	1991 - 1994
Judul Skripsi/ Thesis	Kebijaksanaan Keselamatan Kerja, Semangat Kerja dan Pengaruhnya Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Studi Implementasi Kebijakan UU No 1 Tahun 1970)	Pembangunan Pedesaan Sektor Pangan Di Indonesia (Suatu Tinjauan Ekonomi Politik)
Nama Pembimbing /Promotor	Prof. Dr. Y. Warella, MPA	Dr. Budi Winarno

C. Pengalaman Penelitian

No	Judul	Tahun	Sumber Dana
1	Kajian Potensi Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Demak	1995-1996	LP2M Semarang-BAPP EDA Kab.Demak
2	Kajian tentang Perubahan Strukturisasi Pemerintah Jawa Tengah sebagai implementasi UU Nomor 22 Tahun 1999	1999	LPPSP Semarang-BAPPEDA Prov.Jateng
3	Kajian Profil Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) di Jawa Tengah	2000	FISIP UNTAG Semarang-BAPE RMADES Provinsi Jateng
4	Penelitian / Kajian Kelembagaan Komunitas Lokal di Indonesia (Nasional)	2006	Direktur PBL, Dirjen Cipta Karya DPU Pusat Jakarta
5	Penelitian /Kajian Fasilitas Pelayanan Publik Kab.Pati	2009-2010	Badan Penelitian dan Pengembangan Kab.Pati
6	Penelitian Pencapaian MDGs Kab.Jepara	2010	Bappeda Kab. Jepara
7	Model Pemberdayaan Kelembagaan Dalam Implementasi UU RI Nomor: 6 Tahun 2014 di Desa Kawungen, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang	2015	LPPM UPGRIS Semarang
8	Peran Perempuan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan Di Provinsi Jawa Tengah (Studi	2015	BKKBN Pusat -LPPM UPGRIS

	Analisis Responsif Gender Kota Semarang)		Semarang
9	Survey Tentang Kualitas Pelayanan Publik Dan Korupsi Di Unit Pelayanan SKCK dan SIM POLRESTABES Semarang	2016	IPW Jateng – POLRESTABES Semarang
10	Peran Kelembagaan Komunitas Lokal Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus Di Kelurahan Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan) (Penelitian Bertahap)	2016	LPPM UPGRIS Semarang
11	Peran Kelembagaan Komunitas Lokal Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus Di Kelurahan Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan) (Tahun II)	2017	LPPM UPGRIS Semarang
12	Kapasitas Pemerintahan Desa Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Jawa Tengah.	2018	DIPA LP2M UNWAHAS
13	Peran Pendampingan Desa Dalam Implementasi Undang-Undang Desa Di Jawa Tengah Tahun 2018	2019	DIPA LP2M UNWAHAS

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Judul	Tahun	Tempat
1	Desa Binaan : program pengabdian masyarakat jaringan air bersih di Dusun Keseseh Desa Keseneng Kec Sumowono Kab Semarang, sebagai bendahara tim.,	1995	Dusun Keseseh Desa Keseneng Kec Sumowono Kab Semarang
2	Pembinaan Administasi Pemerintahan Desa di Desa Ngabean Boja Kab Kendal, sebagai anggota tim.l	1996	Desa Ngabean Boja Kab Kendal
3	Pengurus RT sebagai Sekretaris RT, memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat selaku sekretaris RT 09 RW 02 Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang	2004 s/d 2018	RT 09 RW 02 Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang
4	Pengurus RW sebagai Sekretaris RW, memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat selaku sekretaris RW 02 Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang	2018 s/d 2021	RW 02 Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang
5	Berkerjasama dengan Konsultan Provinsi Jawa Tengah membantu melakukan sosialisasi tentang program penanggulangan kemiskinan di perkotaan di Provinsi Jawa Tengah, sebagai anggota tim.	2010	Beberapa Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah
6	Berkerjasama dengan Koordinator Provinsi penanggulangan kemiskinan di Perdesaan	2012	Beberapa Kabupaten di Jawa

	membantu melakukan pembekalan & Penyegaran Fasilitator Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, sebagai anggota tim.		Tengah
7	Berkerjasama Koordinator Provinsi membantu melakukan Sosialisasi tentang penanggulangan kemiskinan di Perdesaan di Provinsi Jawa Tengah, sebagai anggota tim	2014	Beberapa Kabupaten di Jawa Tengah
8	Penyuluhan Tentang “Mengubah Perilaku Masyarakat Sesuai Dengan Hak & Kewajiban Sebagai Warga Negara Yang Baik”, sebagai pembicara/penyuluh.	2016	Di Bina Keluarga Remaja (BKR) “TUNAS BANGSA” RW 02 Kelurahan Muktiharjo Kidul Pedurungan Semarang
9	Penyuluhan tentang pentingnya partisipasi pemilih pemula dalam pemilu serentak, sebagai pembicara/penyuluh.	2019	Balai RW 02 Kelurahan Muktiharjo Kidul Pedurungan Semarang
10	Penyuluhan tentang memupuk kerukunan warga dalam rangka memperkuat NKRI, sebagai pembicara /penyuluh.	2019	Balai RW 02 Kelurahan Muktiharjo Kidul Pedurungan Semarang

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal/Vol
1	1993	Pembangunan Pedesaan Sektor Pangan Di Indonesia, Suatu Tinjauan Ekonomi Politik	Publikasi Ilmiah Pasca Sarjana UGM Yogyakarta
2	1994	Masa Depan Demokrasi Indonesia (Demokrasi Pancasila Saat Ini Dan Masa Depan)	FISIP UNTAG Semarang (Mimbar Administrasi, Edisi IX , ISSN : 0854-3542)
3	1996	Proses Pembuatan Judul Penelitian	FISIP UNTAG Semarang (Mimbar Administrasi, Edisi Khusus , ISSN : 0854-3542)
4	2000	Profil Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) di Jawa Tengah	FISIP UNTAG Semarang (Mimbar Administrasi, Edisi XVII, ISSN : 0854-3542)
5	2002	Model Alternatif : Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada)	FISIP UNTAG Semarang (Mimbar Administrasi, Edisi XX, ISSN : 0854-3542)
6			FISIP UNTAG Semarang

	2004	Memahami Masyarakat Miskin	(Mimbar Administrasi, Edisi XXIV No.2, ISSN : 0854-3542)
7	2007	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Proram Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (PNPM-P2KP)	FISIP UNTAG Semarang (Mimbar Administrasi, Volume I No. 2, ISSN : 0854-3542)
8	2016	Kesiapan Desa Dalam Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang	FISIP Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Semarang, (SPEKTRUM, Volume 13, No.2, Juli 2016, ISSN : 1829-6580)
9	2016	Peran Perempuan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan Di Provinsi Jawa Tengah (Studi Analisis Responsif Gender Kota Semarang)	FISIP Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Semarang, (SPEKTRUM, Volume 13, No.1, Januari 2016, ISSN : 1829-6580)
10	2017	Keembagaan Komunitas Lokal (Studi Tentang Perannya Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Semarang than 2016)	LPPM Universitas Wahid Hasyim Semarang, SOSIO DIALEKTIKA, Vol 2, No.2 Juli –Desember 2017
11	2019	Peran Pendampingan Desa Dalam Implementasi Undang-Undang Desa di Jawa Tengah 2018	LPPM Universitas Wahid Hasyim Semarang, SOSIO DIALEKTIKA, Vol 4, No.2 Juli –Desember 2019 ; Akreditasi RISTEKDIKTI Nomor 36/E/KPT/2019.

F. Pengalaman Penulisan buku

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Indonesia Baru Mulai Dari Desa	2012	165	Bapermades Provinsi Jawa Tengah
2	Gerakan Desa Berdikari, Dari Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Sampai Dengan pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga.	2013	184	Bapermades Provinsi Jawa Tengah
3	Masyarakat Membangun : Pembangunan Infrastruktur Dan Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga Perdesaan	2014	220	Bapermades Provinsi Jawa Tengah

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Proposal Penelitian DIPA Universitas Wahid Hasyim Semarang

Semarang, 30 April 2020

Pengusul / Peneliti

Drs. Suharto, M.Si.
NPP 04.15.2.0351